

Judul : Kemensos ajukan penambahan 5.000 guru untuk Sekolah Rakyat
Tanggal : Minggu, 26 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Kemensos Ajukan Penambahan 5.000 Guru Untuk Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial (Kemensos) mengajukan penambahan lebih dari 5.000 formasi guru dan 4.000 tenaga kependidikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, penambahan personal tersebut diperlukan seiring dengan target peningkatan jumlah siswa yang sangat signifikan pada tahun ini hingga tahun depan.

"Kami sudah mengajukan ke Kementerian PAN-RB untuk menambah

lebih dari 5.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya untuk Sekolah Rakyat ini," kata dia, di Jakarta, Kamis (23/04/2026). Ia menambahkan, saat ini jumlah siswa Sekolah Rakyat mencapai hampir 16.000 orang. Pemerintah menargetkan adanya penambahan lebih dari 30.000 siswa baru pada tahun ini, sehingga total peserta didik diproyeksikan melampaui 45.000 orang.

Hingga tahun depan, Kemensos meningkatkan jumlah siswa baru Sekolah Rakyat hingga lebih dari 60.000, sebagaimana arahan Presiden

Prabowo Subianto. "Jadi, tahun depan target kita secara keseluruhan sudah bisa melayani lebih dari 100.000 siswa Sekolah Rakyat. Untuk itu dibutuhkan tambahan guru," tuturnya. Ia memastikan, para guru dan tenaga pendidik yang terpilih nantinya tetap mengikuti serangkaian pelatihan dan pembinaan khusus atau retreat guna menjaga kualitas pengajaran di Sekolah Rakyat.

"Tetap akan ada retreat dan pelatihan-pelatihan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan bagi siswa kita," kata pria yang akrab

disapa Gus Ipul ini. Rencana tersebut menimbulkan polemik. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendukung rencana tersebut. Ia menjelaskan, penambahan jumlah guru di Sekolah Rakyat merupakan konsekuensi dari bertambahnya jumlah murid. "Usulan ini perlu didukung," katanya. Sementara, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan Guru (P2G), Satriwan Salim memberikan catatan terkait rencana penambahan jumlah

guru sebanyak 5.000 orang. Baginya, rencana itu menjadi angin segar bagi pencari kerja, namun terasa tidak adil bagi guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. "Guru PPPK paruh waktu kerap mengalami keterlambatan pembayaran gaji," imbuhnya. Untuk mengulas lebih jauh pandangan Lalu Hadrian Irfani dan Satriwan Salim terkait rencana penambahan 5.000 guru untuk Sekolah Rakyat, berikut petikan wawancaranya:

LALU HADRIAN IRFANI, Wakil Ketua Komisi X DPR

Usulan Ini Memiliki Landasan Yang Kuat



“Pemerintah tidak hanya perlu fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas guru, termasuk pelatihan dan keselarasan dengan kebijakan pendidikan nasional.”

Bagaimana tanggapan Anda terhadap rencana Pemerintah menambah 5.000 guru untuk program Sekolah Rakyat?

Pada dasarnya, usulan ini memiliki landasan yang kuat. Rencana peningkatan jumlah siswa dari sekitar 45 ribu menjadi 100 ribu tentu membutuhkan tambahan tenaga pendidik yang memadai.

Apa alasan utama kebutuhan tambahan guru dalam program ini?

Konsep Sekolah Rakyat mengacu pada model asrama (boarding school), yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pembinaan karakter dan pendampingan intensif. Hal ini menuntut rasio guru dan siswa yang lebih tinggi dibandingkan seko-

lah pada umumnya.

Apakah kebijakan ini perlu didukung?

Pada prinsipnya, kebijakan ini patut didukung, namun harus disertai dengan pengawasan yang jelas dan ketat.

Apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya?

Pemerintah perlu memastikan bahwa penambahan guru dilakukan dengan perencanaan matang dan terukur, termasuk mempertimbangan rasio ideal guru-siswa, pemerataan distribusi antarwilayah, serta kesesuaian dengan kebutuhan mata pelajaran.

Apakah ada tantangan lain yang perlu diperhatikan?

Ya, Indonesia masih menghadapi persoalan klasik seperti ketimpangan distribusi guru dan status tenaga honorer yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Selain jumlah, apa aspek lain yang penting terkait guru?

Pemerintah tidak hanya perlu fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas guru, termasuk pelatihan dan keselarasan dengan kebijakan pendidikan nasional.

Apa harapan Anda terhadap program Sekolah Rakyat ke depan?

Diharapkan program ini dapat berjalan efektif, tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain, serta memberikan dampak nyata dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan. ■ REN

SATRIWAN SALIM, Koordinator Nasional P2G

Ada Ketidakadilan Pada Tata Kelola Guru



“Terdapat ketimpangan. Guru PPPK di Sekolah Rakyat mendapatkan fasilitas dan kesejahteraan yang baik, sementara guru PPPK paruh waktu di sekolah lain mengalami keterlambatan gaji.”

Apa pendapat Anda tentang rencana Pemerintah menambah 5.000 guru untuk Sekolah Rakyat?

Penambahan guru merupakan konsekuensi logis dari perluasan Sekolah Rakyat yang kini sudah tersebar di 38 provinsi dengan sekitar 166 titik dan jumlah siswa sekitar 16 ribu, yang akan terus bertambah, terutama saat tahun ajaran baru.

Mengapa kebutuhan guru semakin meningkat dalam program ini?

Karena jumlah siswa dan sekolah mengalami peningkatan, maka kebutuhan guru dan tenaga kependidikan juga meningkat. Ini untuk memastikan proses pembelajaran berjalan optimal.

Apakah kebijakan ini membawa dampak positif bagi tenaga pendidik?

Ya, ini menjadi peluang bagi calon guru. Namun, di sisi lain menimbulkan kontras dengan kondisi guru PPPK paruh waktu di sekolah lain yang mengalami keterlambatan gaji.

Apa catatan Anda terkait rencana penambahan guru ini?

Di satu sisi, ini merupakan langkah positif. Namun, di sisi lain menimbulkan kontras dengan kondisi guru PPPK paruh waktu di sekolah negeri yang masih menghadapi persoalan kesejahteraan. Bahkan, ada yang belum menerima gaji selama berbulan-

bulan.

Apa masalah utama yang Anda soroti terkait guru PPPK saat ini?

Terdapat ketimpangan dan perlakuan yang tidak adil. Guru PPPK di Sekolah Rakyat mendapatkan fasilitas dan kesejahteraan yang baik, sementara guru PPPK paruh waktu di sekolah lain justru mengalami keterlambatan gaji dan kurangnya perhatian.

Apa dampak dari kondisi tersebut terhadap tata kelola pendidikan?

Hal ini menciptakan paradoks dan ketidakadilan dalam tata kelola guru di Indonesia, seolah terjadi 'pengkasaan' yang tidak sejalan dengan semangat keadilan bagi tenaga pendidik. ■ REN